BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Pembahasan usaha kecil menengah masuk dalam pengelompokan jenis usaha yang meliputi industri dan perdagangan. Pengertian tentang usaha kecil menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan negara itu. Mengenai pengertian usaha kecil ternyata sangat bervariasi, disatu negara dengan negara lainnya. Dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan.[14]

Pengertian usaha kecil menengah di Indonesia masih beragam. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM) Usaha kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan Menurut Badan Pusat StatistikUKM berdasarkan kuantitas kerja, yaitu

[14]Partomo, *Ekonomi Skala Kecil*…, hal.13

usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.[15]

Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah:

> Usaha Kecil menurut Undang-Undang No.9 tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan Usaha Menengah menurut Impres No. 5 Tahun 1998, adalah usaha yang bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).[16]

---

[15]Ade Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Di Indonesia*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011), hal. 12

[16]http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995, Bab II, pasal 4, tentang Usaha Kecil*. Diakses 28 November 2018

2. Klasifikasi dan Ciri - Ciri UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklarifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:[17]

a. *Livelihood Activities,* merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini sangat besar.

b. *Micro enterprise,* merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UKM ini di Indonesia juga cukup besar.

c. *Small Dynamic Enterprise,* merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua.

d. *Fast Moving Enterprise,* merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.

---

[17]Partomo, *Ekonomi Skala Kecil*…, hal. 25

Ciri – Ciri Usaha Kecil Menengah (UKM):[18]

a. Bahan baku mudah diperoleh.
b. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
c. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun.
d. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
e. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor.
f. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

3. Peluang Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa keunggulan komparatif terhadap usaha besar. Keunggulan tersebut antara lain : Dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang relatif kecil dibanding usaha besar. Disamping itu juga teknologi yang digunakan tidak perlu teknologi yang tinggi, sehingga pendiriannya relatif mudah dibandingkan dengan usaha besar.

Motivasi usaha kecil akan lebih besar, mengingat hidup matinya tergantung kepada usaha satu-satunya. Seseorang dengan *survival motive* tinggi tentu akan lebih berhasil dibandingkan seseorang yang motivasinya tidak setinggi itu. Selain itu adanya ikatan emosional yang kuat dengan

[18]Arief Rahmana, *Peranan Tekhnologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*, Seminar Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta, 2009, hal. 24

usahanya akan menambah kekuatan para pengusaha kecil dalam persaingan.[19]

Usaha kecil memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan pola permintaan pasar, bahkan sanggup melayani selera perorangan. Berbeda dengan usaha besar yang umumnya menghasilkan produk masa (produk standar), perusahaan kecil produknya bervariasi sehingga akan mudah menyesuaikan terhadap keinginan konsumen. Disamping itu juga mempunyai kemampuan untuk melayani permintaan yang sangat spesifik yang bila diproduksi oleh perusahaan skala besar tidak efisien (tidak menguntungkan).

Usaha kecil Merupakan tipe usaha yang cocok untuk proyek perintisan. Sebagian usaha besar yang ada saat ini merupakan usaha skala kecil yang telah berkembang, dan untuk membuka usaha skala besar juga kadangkala diawali dengan usaha skala kecil.Hal ini ditujukan untuk menghindari risiko kerugian yang terlalu besar akibat kegagalan jika usaha yang dijalankan langsung besar, sebab untuk memulai usaha dengan skala besar sudah tentu diperlukan modal awal yang besar juga.[20]

Perdagangan bebas telah memberikan peluang kepada para pengusaha di dalam negeri untuk dapat menjual produknya ke luar negeri. Dengan dibukanya perdagangan bebas maka penghambat untuk masuk ke suatu negara menjadi tidak ada lagi. Dengan perkataan lain pergerakan

---

[19]https://kartawan.files.wordpress.com. *Departemen Koperasi, Beberapa Model Pengembangan Usaha Kecil.* Diakses 29 November 2018

[20]Nitisusatro, Mulyadi, *Perlaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.74

barang dari suatu negara ke negara lain menjadi mudah tanpa adanya penghambat. Di samping itu dengan adanya depresiasi rupiah, maka perdagangan luar negeri (ekspor) menjadi lebih terbuka dengan memanfaatkan persaingan harga.[21]

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional di masa mendatang, UKM harus dapat melakukan antisipasi secara tepat terhadap globalisasi ekonomi, karena dalam kondisi tersebut ekonomi Indonesia akan semakin terintegrasi kedalam system ekonomi global yang ditandai oleh kemauan kuat untuk mengurangi berbagai bentuk proteksi serta mendorong proses deregulasi dan debirokratisasi menuju system ekonomi yang terbuka dan lebih berorientasi pada mekanisme pasar. Untuk itu tuntutan terhadap efisiensi dan produktivitas semakin tinggi agar dapat bersikap proaktif dalam proses globalisasi. Ekonomi kokoh yang ingin diwujudkan adalah ekonomi yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, memiliki keterkaitan industry, mendorong transformasi ekonomi dan mampu memeratakan hasil-hasil pertumbuhannya. Dengan adanya pembinaan UKM diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan UKM, sehingga akan semakin memperkokoh ketahanan perekonomian daam menghadapi era globaisasi dan perdagangan bebas. Strategi pengembangan UKM antara lain adalah

a. Kemitraan Usaha

[21]https://kartawan.files.wordpress.com. *Departemen Koperasi, Beberapa Model Pengembangan Usaha Kecil.* Diakses 1 Desember 2018

Hubungan kerja sama usaha di antara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar.

Dalam praktek bisnis Internasional saat ini, kemitraan usaha merupakan salah satu strategi bisnis perusahaan terutama bagi perusahaan besar yang tidak lagi mengandalkan pada strategi internalisasi aktivitas usaha melalui akusisi dan marger dalam rangka integrasi vertical dan horizontal. Kemitraan usaha merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko usaha, meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha.

b. Permodalan UKM

Pada umumnya permodalan UKM masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UKM yang di maksud.

Arah kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan strategi sebagai berikut:

a) Memadukan dan memperkuat tiga aspek, yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan.
b) Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

c) Mengoptimalkan realisasi *business plan* perbankan dalam pemberian KUK (Kredit Usaha Kecil).
d) Bantuan teknis yang efektif, bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
e) Meningkatkan lembaga penjaminan kredit yang ada.
f) Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK)
2) Melanjutkan Bantuan Teknis
3) Melanjutkan Proyek Kredit Mikro Bank Indonesia (Linkage Program)

c. Modal Ventura

Modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Menurut KeppresNo. 61 Tahun 1998, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pengembangan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Pengembangan untuk perusahaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan dalam bentuk [injaman atau kredit.

Usaha modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara ikut melakukan penyertaan modal langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Perusahaan yang dibiayai disebut perusahaan pasangan usaha atau *investee company*, dan pemodal yang membiayai disebut *investment company* atau *venture capitalist*.[22]

4. Permasalahan dan Penghambat UKM

UKM menjadi pusat perhatian karena tingkat perekonomian dan pengetahuan yang "kurang maju" dalam berbisnis. UKM menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan usaha (bisnis), antara lain kurang pengetahuan pengelolaan usaha, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Kondisi pasar yang dihadapi UKM adalah persaingan monopolistik di samping itu merupakan fakta yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya UKM harus merencanakan strategi bisnis yang tepat.

Sebagai pelaku ekonomi UKM masih menghadapi kendala struktural kondisional secara internal, seperti struktur permodalan yang relatif lemah dan juga dalam mengakses ke sumber-sumber permodalan yang sering kali terbentur masalah agunan sebagai salah satu syarat perolehan kredit.

Keterampilan teknis rendah dan teknologi produksi sederhana. Rendahnya keterampilan teknis dari para pekerja berakibat pada sulitnya standarisasi produk. Begitu juga penggunaan teknologi produksi yang sederhana mengakibatkan mutu produk yang dihasilkan bervariasi. Kalau

[22]Partomo, *Ekonomi Skala Kecil*…, hal. 30

hal ini terjadi, maka produk yang dikirim kemungkinan akan di klaim oleh konsumen. Hal ini akan sangat merugikan, apalagi jika produk ditolah oleh konsumen luar negeri.

Para pekerja umumnya keluarga, artinya dalam perekrutan pekerja lebih dilakukan kepada aspek kekeluargaan yaitu lebih mementingkan kedekatan hubungan dibandingkan dengan keahlian yang dimiliki. Dalam manajemen tidak ada spesialisasi bahkan sering kali pemilik menangani sendiri, artinya dalam menjalankan perusahaan tidak terdapat job description yang jelas. Disamping itu tingkat perputaran tenaga kerja tinggi. Hal ini akan mengakibatkan sulitnya menjadikan tenaga menjadi betul-betul ahli. Lemah dalam administrasi keuangan. kondisi ini sering kali menjadi penyebab sulitnya perusahaan mengajukan kredit ke pihak ketiga, sebab para investor baru mau menanamkan uangnya apabila terjamin keamanannya, artinya uang yang diturunkannya dijamin akan kembali dan sekaligus memperoleh keuntungan. Lemahnya administrasi keuangan mengakibatkan sulitnya melakukan penilaian kelayakan.[23]

Banyak biaya di luar pengendalian terkait dengan lemahnya administrasi keuangan seringkali dijumpai tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi sehingga sehingga membengkaknya prive diraksi, tidak memperhitungkan penyusutan dan aktiva tetap, tidak memperhitungkan tenaga keluarga. Kesulitan memperoleh ijin usaha.Birokrasi yang harus ditempuh UKM dalam

[23]http://usahakecilsutejo, Jurnal Kontribusi Perusahaan Kecil, Diakses 30 November 2018

mengurus perijinan seringkali cukup panjang sehingga menyebabkan lamanya waktu yang diperlukan untuk sampai memperoleh perijinan.[24]

Strategi bisnis yang perlu diambil antara lain adalah sebagai berikut:

1) Untuk dapat mengembangkan UKM perlu dipelajari terlebih dulu tentang ciri-ciri definisi/pengertian kelemahan-kelemahan serta potensi-potensi yang tersedia serta perundang-undangan yang mengaturnya.
2) Dibadan usaha tersebut diperlukan bantuan manajeral agar tumbuh inovasi-inovasi mengelola UKM berdampingan dengan usaha-usaha besar.
3) Secara vertical dalam system gugus usaha, usaha kecil menengah (UKM) bisa menjadikan diri komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama. Maka diperlukan suatu strategi UKM menjalin kerja komplementer dengan usaha-usaha besar.
4) Kerja sama bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk(*entry*) dalam usaha tertentu. Di Indonesia kemitraan usaha yang berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintah menganggap perlu membentuk Departemen khusus untuk menangani UKM dan koperasi.

5. Sasaran Pembinaan dan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membuat sesuatu yang tadinyatidak berdaya menjadi berdaya. Pembinaan adalah suatu perlakuan agar UKM memiliki kemampuan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut

[24] Ade Raselawati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Di Indonesia* (Skripsi)..., hal. 18-21

dilakukan melalui pembinaan. Adapun sasaran pembinaan yang dilakukan terhadap pengusaha kecil adalah mengurangi atau kalau mungkin menghilangkan kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan yang dimiliki/dihadapi perusahaan serta meningkatkan dan memanfaatkan keunggulan dan peluangnya, seperti:

a. Berkembangnya skala usaha
b. Peluang usaha
c. Pangsa pasar[25]

Dengan adanya intervensi dari pihak eksternal, diharapkan skala usaha mereka dapat ditingkatkan dari kecil menjadi menengah, dandari menengah menjadi besar. Begitu juga dengan adanya bantuan untuk akses ke pihak luar, maka peluang usaha dan pangsa pasar dapat dikembangkan. Akses terhadap sumber permodalan membantu akses ke penyandang dana/investor atau pemberi/penyedia kredit akan memecahkan masalah kebutuhan permodalan perusahaan, karena bukan mereka tidak mau memberikan pendaan kepada para pengusaha, akan tetapi karena masing-masing tidak tahu dan tidak saling kenal. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang bisa menghubungan antara kedua pihak tersebut.

Peningkatan kemampuan kewirausahaan. Kemampuan kewirausahaanmerupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, dimana seorang pengusaha harus mampu mengambil

[25]Arief Rahmana, Peranan Tekhnologi Informasi dalam Peningkatang Daya Saing Usaha Kecil Menengah, Seminar Teknologi Informasi (SNATI), ISSN:1907-5022,(Yogyakarta, 2009), hal.58

keputusan, mendelegasikan wewenang secara jelas, mengambil risiko yang moderat, memotivasi karyawan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan sifat kewirausahaan lainnya.

Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis. Seorangpengusaha adalah seorang manajer, oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk mengkoordinasikan semua bawahannya serta memanage seluruh potensi yang dimiliki. Keterampilan teknis karyawan pada UKM umumnya rendah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan yang seringkali tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Peningkatan dan pemantapan keterkaitan dan kemitraan yang saling membutuhkan, saling menghidupi, dan saling menguntungkan. Saat ini seringkali terjadi kemitraan yang tidak sesuai dengan pola yang diinginkan. Dalam kemitraan Usaha kecil dengan Usaha Besar seharusnya usaha besar bisa memberikan subsidi kepada usaha kecil, tapi seringkali dijumpai kondisi sebaliknya dimana usaha kecillah yang mensubsidi usaha besar.[26]

6. Fungsi dan Peran UKM

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki fungsi dan peran yang sangat penting untuk perekonomian Nasional. Adapun fungsi dan peran dari UKM diantaranya sebagai penyedia barang dan jasa, peningkatan

[26]Nitisusatro, Mulyadi, *Perlaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 67

taraf hidup, penyerapan tenaga kerja, untuk pemerataan pendapatan, maupun sebagai nilai tambah bagi produk daerah.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Definisi Sejahtera

Menurut Rambe, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.[27]

Menurut Fahrudin, kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.[28]

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga

[27] Armaini Rambe, et. all., *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)...,* hal. 16

[28] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 9

memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya . Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.[29]

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat disefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan ukhrowi. Todaro dan Stephen C. Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

[29]Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LIPI Pers, 2011), hal.22

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

b. Tingkat Kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c. Memperluas Skala Ekonomi dari Individu dan Bangsa

Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.[30]

kesejahteraan merupakan suatu tahap dalam terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang dimana orang tersebut bisa merasa cukup dan tidak mempunyai rasa kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesehatan, pendidikan, dalam memenuhi semua itu diharapkan diharapkan UKM dapat menjadi pendongkrak dan sebagai motor untuk kesehteraan masyarakat menengah ke bawah.

2. Definisi Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari Bahasa arab "*syaraka*" yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau "*musyakara*" berarti "*saling bergaul*". Pendapat sejenis juga dikemukakan oleh Syani bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama,

[30]Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*…, hal.64

hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesempatan menjadi masyarakat.

Masyarakat sebagai terjemahan dari istilah *society*. Kata *society* berasal dari Bahasa latin, *societas* yang berarti hubungan persahabatan dengan lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata social. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Istilah masyarakat mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.adapun sekelompok manusia bisa dikatakan masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta system (aturan) yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.[31]

Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Hassan Shadily mengatakan bahwa masyarakat dapat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia,

[31]Binti Maimunah,,*Sosialisasi Sosial Anak di dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat,* (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2016), Hal. 114

yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. [32]

Garna mengatakan, semua keompok masyarakat, organisasi, komunitas terbentuk oeh individu yang melakukan interaksi. Karena itu, masyarakat ialah para individu yang sedang melakukan interaksi dalam mengambil peranan komunikasi dan interpretasi bersama-sama menyesuaikan tindakannya. Dan Koentjaraningrat juga merumuskan definisi masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu ras, identitas bersama, dan dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.[33]

Supaya dapat menjelaskan pengertian masyarakat secara umum maka perlu ditelaah tentang ciri-ciri dari masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

a. Manusia yang hidp bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang muntlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti seumpamanya

[32]Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), Hal. 31

[33]Maimunah, *Interaksi Sosial Anak*…, Hal. 115

kursi, meja, dan sebagainya. Oleh Karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, merekajuga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
d. Mereka merupakan suatu system hidup bersama. System kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat di atas Nampak selaras dengan definisi masyarakat sebagaimana telah dikemukakan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.[34]

Jadi dapat dirumuskan bahwa pengertian masyarakat adalah kumpulan orang yang didalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Dalam kebersamaan yang lama terjadi interaksi social. Selanjutnya orang-orang yang membentuk masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Masyarakat merupakan suatu system hidup bersama,dimana mereka menciptakan nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.Bentuk atau wujud interaksi manusia dalam sebuah

[34]Abdulsyani, *Sosiologi*…, Hal. 32

masyarakat, dapat bernama keluarga, RT, RW, Dusun, Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan Negara.[35]

3. Indikator Kesejahteraan

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tapi pengembangan potensi dan kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Sadono Sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu:

a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis.
b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga Negara.
c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.[36]

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik, dan non fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dengan menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak.

[35]Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 82
[36]Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik dan Baru*, (Jakarta: Raja Perindo Persada, 2012), hal. 51

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur kesejahteraan manusia, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan

   Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

b. Perumahan dan pemukiman

   Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

c. Pendidikan

   Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga Negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar.

Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status social, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis.

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat dati mampu tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.[37]

4. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan menjadi lima jenis yaitu:

a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*Basic Needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

[37]Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), hal. 96

b. Sejahtera I

Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar secara minimal,tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikolognya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, rumah untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

c. Sejahtera II

Sejahtera II adalah keluarga-keluarga yang disamping dapat memenuhi kebutuhan dasarnya juga dapat memenuhi kebutuhan sosial spikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (*Development needs*) seperti kebutuhan untuk meningkatkan agama, menabung, berinteraksi dengan keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.

d. Sejahtera III

Sejahtera III adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan spikologis, dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga

kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan sebagainya.

e. Sejahtera III +

Sejahtera III + adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.[38]

5. Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam

Kesejahteraan adalah perasaan aman sentosa, makmur, damai dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai *Falah*, yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.[39] Kehidupan yang muia dan kesejahteraan didunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang yang memberikan dampak yang disebut *mashlahah* yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.[40]

Mannan berpendapat bahwa kesejahteraan berkaitan dengan proses produksi. Menurut Mannan prinsip fundamental yang harus selalu

---

[38] Wahyu Prastyaningrum, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung* (Skripsi), Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, 2009, hal. 16-17

[39] Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), hal. 2

[40] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 46

diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada secara maksimum, baik manusia maupun benda, selanjutnya diiringi dengan perbaikan sistem produksi, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan maksimal dengan usaha minimal namun dalam hal konsumsi tetap berpedoman pada nilai – nilai keislaman. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, meningkatnya produksi barang belum tentu menjamin kesejahteraan secara ekonomi, karena disamping peningkatan produksi juga harus memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari barang – barang yang diproduksi. Untuk itu Islam telah melarang memperoduksi barang – barang yang dilarang dalam Islam seperti akhohol, karena peningkatan produksi barang ini belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi.[41]

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan social sejalan dengan misi Islam itu sendiri, dimaksudkan dalam ayat Al-qur'an surat Al-Anbiya (21), ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya :"Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (Q.S. al-anbiyâ' 21: 107).[42]

Misi yang dimaksud dalam ayat diatas adalah untuk menegaskan kepada seluruh manusia bahwa tiada tuhan selain Allah SWT di bumi

---

[41] Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hal. 54.

[42]Al Qur'an Surat al-Anbiya'(21) : 107

maupun di alam semesta lainnya. Barang siapa yang mengakui kekuasaan Allah SWT, maka dipastikan kesejahteraan dalam hidupnya dan keyakinannya kepada Allah SWT akan meningkatkan kedudukannya menjadi manusia yang mulia. Tidak hanya hubungan manusia dengan tuhannya, tetapi hubungan yang terjalin baik antara manusia dengan manusia yang lainnya juga dapat menciptakan kesejahteraan khususnya kesejahteraan di dalam jiwa manusia itu sendiri.

Dalam Islam terdapat maslahah yang bertujuan untuk menentukan perbuatan suatu perbuatan. Ada pun beberapa sifat *mashlahah*, antara lain:

a. *Maslahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah sesuatu perbuatan merupakan suatu *maslahah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria *maslahah* ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.
b. *Maslahah* orang perorangan akan konsisten dengan *maslahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *pareto optimum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan dan kesejahteraan orang lain.[43]

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan *dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*.[44]

---

[43]Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung: Kencana, 2011), Edisi I, hal. 164

[44]*Ibid*, hal. 165

a. *Dharuriyat*, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan.*Dharuriyat* menunjukan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, *dharuriyat* terbagi manjadi lima poin yang bisa dikenal dengan *al-kulliyat al khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan kelima hal diatas, yang apabila tidak tercukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.
b. *Hajiyat*, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya akan menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah *value* atau nilai kehidupan manusia.
c. *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai – nilai dasar dalam ekonomi yaitu:

a. *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai – nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.

b. *Pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap perilaku ekonomi memiliki tanggungjawab untuk perilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.

c. *Tafakul* (jaminan sosial), adanya jaminan social dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.[45]

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah karya ilmiah yang sudah terlebih dahulu meneliti mengenai objek yang sama, adapun penelitian terdahulu mengenai UKM adalah sebagai berikut:

Menurut Moch Hari[46] dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi media sosial terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengaruh media sosial terhadap peningkatan pemasaran UKM, dan pengaruh media sosial terhadap peningkatan produktivitas UKM. Penelitian ini menggunakan metode wawancara

---

[45] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 63

[46] Moch Hari Purwidiantoro, et. all., *Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)* , Jurnal Eka Cida, Vol.1 No.1, 2016

terstruktur, wawancara mendalam dan observasi terhadap UKM dan media sosial yang digunakan. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah ukm yang diobservasi telah menggunakan media sosial dalam perusahaannya dan media sosial yang paling banyak digunakan adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada metode yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Sedangan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaruh media sosial terhadap perkembangan, pemasaran, dan produktivitas UKM dibandingkan dengan penelitian yang saya diteliti disini lebih memfokuskan pada peran Usaha Kecil Menengah yang ada di Kecamatan Tanjunganom terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Maulana[47] dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang penulis

[47] Maulana Ibrahim, *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.4 No.1, 2016

lakukan yaitu menunjukan bahwa UKM yang ada di Kota Samarinda khususnya di Kelurahan Jawa yang semakin tahun mengalami peningkatan, baik itu peningkatan dalam jumlah UKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan pengetahuan-pengetahuan kemampuan UKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada peran Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda dibandingkan dengan penelitian yang saya diteliti disini lebih menekankan pada peran Usaha Kecil Menengah yang ada di Kecamatan Tanjunganom terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Ariani[48] dalam penelitian yang bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan dan peningkatan daya saing dalam menghadapi kompetitif pasar bebas *ASEANEconomic Community (AEC) 2015*, pada UMKM dikota Tarakan, Kalimantan Utara. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan metode sample menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut adalah berdasarkan analisis internal dan eksternal UMKM kota Tarakan dapat diperoleh bahwa yang menjadi strategi utama adalah strategi *Growth* (pertumbuhan) dimana UMKM kota Tarakan memanfaatkan seluruh kekuatan UMKM yaitu memepertahankan kualitas dari bahan baku, legalitas/ijin produk yang masuk dalam kualifikasi, harga yang tetap bersaing dan melakukan

[48] Ariani dan Mohamad Nur Utomo, *Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan*, jurnal organisasi dan manajemen, Vol.13 No.2, 2017

peningkatan SDM di dalam UMKM di kota Tarakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada metode analisis yang digunakan yakni pendekatan deskriptif. Sedangan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan pengembangan strategi dan peningkatan daya saing dalam menghadapi *ASEAN Economic Community (AEC)* 2015 di UMKM Kota Tarakan dibandingkan dengan penelitian yang saya diteliti disini lebih memfokuskan pada peran Usaha Kecil Menengah yang ada di Kecamatan Tanjunganom dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Sulistyo[49] dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mendeskripsikan tatanan ekonomi khususnya UKM di Kab Malang melalui telaah performance yang berbasis ekonomi kerakyatan, mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi UKM, mendeskripsikan upaya-upaya pemecahan permasalahan UKM, mesdeskripsikan aksebilitas akses kegiatan UKM, dan mendeskripsikan peluang pengembangan kegiatan ekonomi UKM terutama di Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu secara umum permasalahan UKM di Kabupaten Malang terkait dengan permodalan, pemasaran, manajemen dan sumber daya manusia yang lemah. Model pengembangan UKM yang bisa ditempuh dengan merubah model piramide menjadi model belah ketupat yang bercirikan ekonomi kerakyatan. Berbagai upaya yang efektif dalam pengembangan UKM antara lain : penciptaan iklim usaha yang kondusif, bentuan permodalan, perlindungan

[49] Sulistyo, *Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Basis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Malang*, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol.6, No.1, 2010

usaha, pengembangan kemitraan, adanya pelatihan, membentuk lembaga khusus, pengembangan promosi, dan pengembangan kerjasama setara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada metode analisis yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada pendeskripsian mengenai tatanan ekonomi UKM yang ada di Kabupaten Malang melalui telaah performance yang berbasis ekonomi kerakyatan, dibandingkan dengan penelitian yang saya diteliti disini lebih menekankan pada peran Usaha Kecil Menengah yang ada di Kecamatan Tanjunganom dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Verniaputri,[50] dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner, strategi pengembangan UKM berbasis kuliner serta persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukan bahwa pertama, faktor penghambat yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner yaitu permodalan, bahan baku, peralatan, sumber daya manusia dan lahan tempat sedangkan faktor pendukungnya yaitu perijinan, pelatihan, pemasaran, dan

[50] Verniaputri Agusetyaningrum, et.all., *Strategi Pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM) untuk Meningkatkan Citra Kota Malang sebagai Destinasi Wisata Kuliner (Studi pada UKM Berbasis Kuliner Kota Malang),* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.38 No.2, 2016

paguyupan. Kedua, strategi pengembangan UKM berbasis kuliner yaitu pelatihan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan dan pengembangan promosi. Ketiga, persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang yaitu dipengaruhi oleh kemasan produk yang ditampilkan dan inovasi produk yang diciptakan oleh pelaku UKM kuliner di Kota Malang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara. Sedangan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner dan persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang, dibandingkan dengan penelitian yang saya diteliti disini lebih memfokuskan pada peran Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kecamatan Tanjunganom terhadap kesejahteraan masyarakatnya.